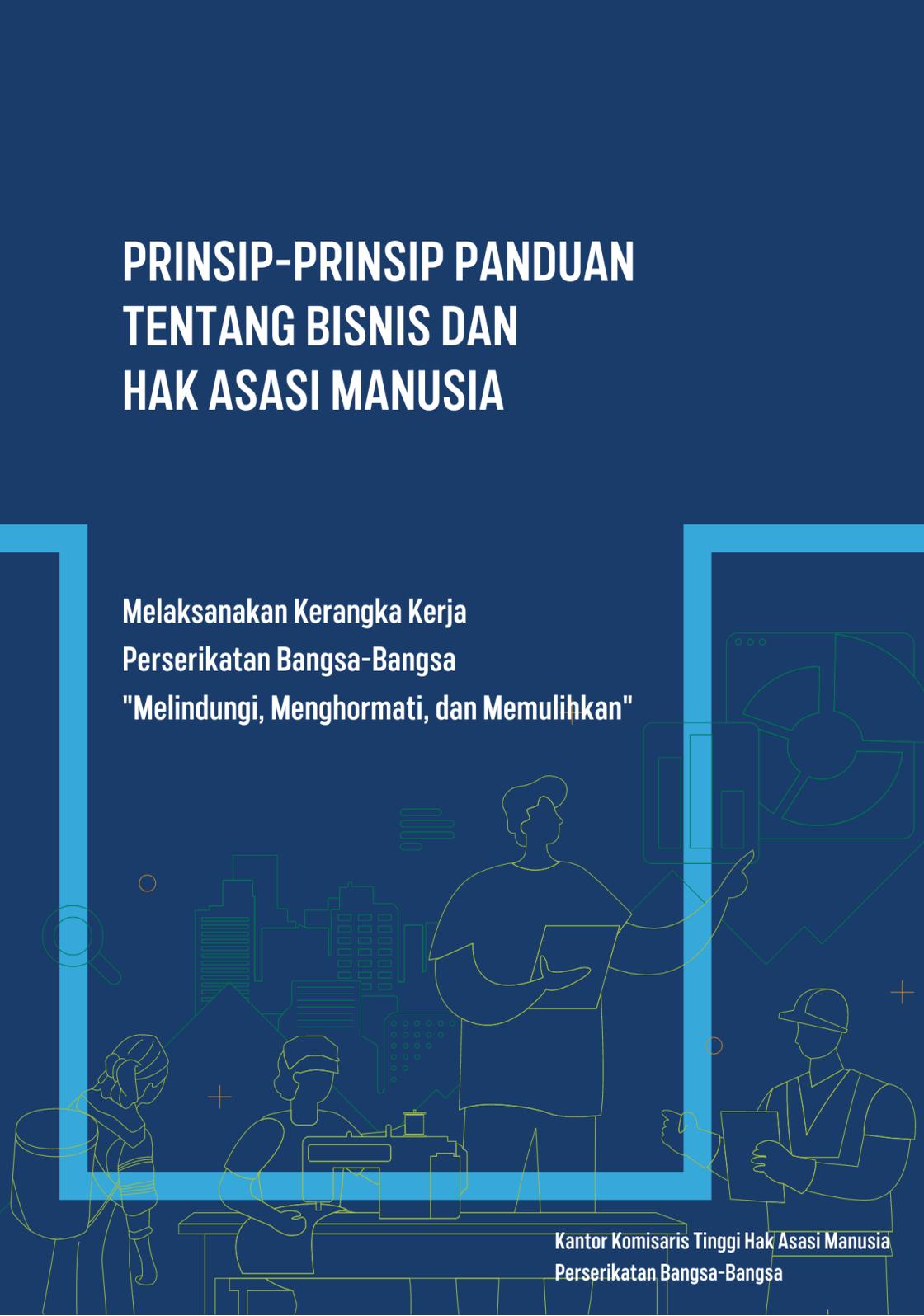


# PRINSIP-PRINSIP PANDUAN TENTANG BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA

Melaksanakan Kerangka Kerja  
Perserikatan Bangsa-Bangsa  
"Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan"

A line art illustration in white and light blue on a dark blue background. It depicts a business meeting scene. In the center, a man stands holding a document and pointing towards a large screen displaying a pie chart. To his left, a woman sits at a desk with a computer monitor. In the foreground, another woman is shown from the back, carrying a large bag. To the right, a man wearing a hard hat and safety vest stands holding a document. The background features stylized buildings and various geometric shapes like circles and plus signs.

Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia  
Perserikatan Bangsa-Bangsa



## Catatan

Publikasi ini adalah terjemahan tidak resmi, di mana penerbit menerima tanggung jawab penuh. Meskipun semua upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratannya, kami menyarankan agar pembaca merujuk ke versi bahasa Inggris asli untuk setiap penggunaan atau kutipan resmi.

Publikasi ini diproduksi dengan dukungan keuangan dari Uni Eropa melalui program Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Asia: Mengaktifkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan melalui proyek Kerangka Kerja Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan, yang dilaksanakan oleh Program Pembangunan PBB.

Pandangan yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah milik penulis dan tidak mewakili pandangan Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk UNDP, atau Negara Anggota PBB.

Sebutan yang digunakan dan penyajian materi dalam publikasi ini tidak menyiratkan pernyataan pendapat apa pun dari pihak Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai status hukum negara, wilayah, kota atau daerah mana pun, atau otoritasnya, atau tentang batas-batas atau batas-batasnya.

Lambang dokumen PBB terdiri dari huruf besar yang digabungkan dengan angka. Penyebutan simbol semacam itu menunjukkan referensi ke dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Karya ini diterbitkan untuk dan atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa.

HR/PUB/11/04

© 2011 Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk edisi Bahasa Indonesia.  
Semua hak di seluruh dunia dilindungi undang-undang



Funded by  
the European Union



# Daftar Isi

<b>I. KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA</b>	<b>3</b>
A. PRINSIP-PRINSIP MENDASAR	3
B. PRINSIP-PRINSIP OPERASIONAL	4
<b>II. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UNTUK MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA</b>	<b>13</b>
A. PRINSIP-PRINSIP MENDASAR	13
B. PRINSIP-PRINSIP OPERASIONAL	16
<b>III. AKSES TERHADAP PEMULIHAN</b>	<b>27</b>
A. PRINSIP-PRINSIP MENDASAR	27
B. PRINSIP-PRINSIP OPERASIONAL	28

Publikasi ini mengandung "Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Melaksanakan Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa 'Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan'" yang dikembangkan oleh Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk isu hak asasi manusia dan perusahaan transnasional dan entitas bisnis lainnya. Perwakilan Khusus melampirkan Prinsip-Prinsip Panduan dalam laporan akhirnya kepada Dewan Hak Asasi Manusia (A/HRC/17/31), yang mencakup juga sebuah pengantar tentang Prinsip-Prinsip Panduan dan tinjauan umum proses yang memicu pengembangannya.

Dewan Hak Asasi Manusia mengesahkan Prinsip-Prinsip Panduan ini dalam resolusi 17/4 tertanggal 16 Juni 2011.



## PRINSIP-PRINSIP UMUM

Prinsip-Prinsip Panduan ini didasarkan pada pengakuan atas:

- (a) Kewajiban negara yang ada untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dan kemerdekaan mendasar;
- (b) Peran badan usaha sebagai organ khusus masyarakat yang melaksanakan fungsi khusus, dituntut untuk mematuhi semua hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia;
- (c) Kebutuhan untuk menyediakan pemulihan terhadap hak dan kewajiban dengan patut dan efektif ketika dilanggar.

Prinsip-Prinsip Panduan ini berlaku bagi semua Negara dan semua badan usaha, baik transnasional dan lainnya, terlepas dari ukuran, sektor, lokasi, kepemilikan, dan struktur.

Prinsip-Prinsip Panduan ini harus dipahami sebagai suatu kesatuan yang koheren dan harus dibaca, secara individu maupun kolektif, sehubungan dengan tujuan mereka untuk meningkatkan standar dan praktik terkait bisnis dan hak asasi manusia sehingga mencapai hasil yang nyata bagi individu dan masyarakat yang terdampak, dan dengan demikian berkontribusi juga terhadap globalisasi yang berkelanjutan secara sosial.

Tidak ada satu hal pun dalam Prinsip-Prinsip Panduan yang dapat dianggap menciptakan kewajiban hukum internasional yang baru, atau dianggap membatasi atau mengurangi tanggung jawab hukum apa pun yang telah diambil suatu negara atau yang dikenakan kepadanya di bawah hukum internasional sehubungan dengan hak asasi manusia.

Prinsip-Prinsip Panduan ini harus dilaksanakan tanpa diskriminasi, dengan perhatian khusus terhadap hak dan kebutuhan, serta tantangan yang dihadapi oleh individu dari kelompok atau masyarakat yang mungkin berada pada risiko lebih tinggi untuk menjadi rentan atau termarginalkan, dan dengan memperhatikan berbagai risiko yang mungkin dihadapi perempuan dan laki-laki.



# I. KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA

## A. PRINSIP-PRINSIP MENDASAR

1. **Negara harus memberi perlindungan dari penyalahgunaan hak asasi manusia oleh pihak ketiga di wilayah dan/atau yurisdiksi mereka, termasuk oleh badan usaha. Hal ini mencakup pengambilan langkah-langkah sepantasnya untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memperbaiki penyalahgunaan tersebut melalui kebijakan, legislasi, peraturan, dan adjudikasi yang efektif.**

### *Penjelasan*

Kewajiban hukum hak asasi manusia internasional suatu negara menuntut agar mereka menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia para individu dalam wilayah dan/atau yurisdiksi mereka. Termasuk di sini tugas untuk melindungi dari penyalahgunaan hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk oleh badan usaha.

Tugas negara untuk melindungi merupakan standar perilaku. Oleh karena itu Negara tidak secara intrinsik bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia oleh aktor swasta. Namun demikian, Negara dapat melanggar kewajiban hukum hak asasi manusia ketika pelanggaran hak asasi manusia tersebut dapat dikaitkan kepadanya, atau ketika Negara gagal mengambil langkah-langkah untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memulihkan pelanggaran oleh aktor swasta. Walaupun umumnya Negara memiliki kebebasan bertindak dalam memutuskan langkah-langkah tersebut, namun mereka harus mempertimbangkan berbagai tindakan pencegahan dan perbaikan yang diperbolehkan, termasuk kebijakan, legislasi, peraturan, dan adjudikasi. Negara juga memiliki tugas untuk melindungi dan mempromosikan peraturan hukum, termasuk dengan mengambil tindakan untuk memastikan persamaan di depan hukum, keadilan dalam penerapannya, dan dengan menyediakan akuntabilitas yang memadai, kepastian hukum, dan transparansi prosedural dan legal.

Bab ini fokus pada tindakan preventif sementara Bab III menguraikan tindakan pemulihan.

2. **Negara harus menetapkan dengan jelas tuntutan bahwa semua badan usaha yang berdomisili di wilayah dan/atau yurisdiksinya harus**

## **menghormati hak asasi manusia dalam seluruh operasi mereka.**

### *Penjelasan*

Saat ini, Negara secara umum tidak dituntut oleh hukum hak asasi manusia untuk mengatur kegiatan dari bisnis yang berdomisili di wilayah dan/atau yurisdiksinya yang mereka lakukan di luar wilayahnya. Namun secara umum mereka juga tidak dilarang untuk melakukannya, dengan syarat ada dasar yurisdiksi yang diakui untuk itu. Dalam parameter ini, beberapa badan pakta hak asasi manusia merekomendasikan agar Negara mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran di luar negeri oleh badan usaha di dalam yurisdiksi mereka.

Ada alasan kebijakan yang kuat bagi Negara asal untuk menetapkan secara jelas agar bisnis menghormati hak asasi manusia di luar negeri, terutama jika Negara itu sendiri terlibat dalam atau mendukung bisnis tersebut. Termasuk di sini memastikan kemudahan bagi badan usaha untuk memperkirakan dengan menyediakan pesan-pesan yang koheren dan konsisten, dan menjaga reputasi Negara itu sendiri.

Negara telah mengadopsi sejumlah pendekatan dalam hal ini. Beberapa merupakan langkah-langkah domestik dengan implikasi ke luar wilayah. Contohnya termasuk persyaratan bagi perusahaan induk untuk melaporkan operasi global seluruh perusahaan; instrumen hukum lunak seperti Panduan bagi Perusahaan Multinasional dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi; dan standar kinerja yang dituntut oleh institusi yang mendukung investasi luar negeri. Pendekatan lain mencakup legislasi dan penegakan luar wilayah secara langsung. Termasuk di sini sistem pidana yang memungkinkan penuntutan berdasarkan kewarganegaraan pelaku di mana pun pelanggaran itu terjadi. Berbagai faktor dapat berkontribusi terhadap kewajaran tindakan Negara, baik menurut persepsi maupun fakta, misalnya, apakah tindakan tersebut didasarkan pada perjanjian multilateral.

## **B. PRINSIP-PRINSIP OPERASIONAL**

### **FUNGSI REGULATORI DAN KEBIJAKAN NEGARA SECARA UMUM**

**3. Dalam memenuhi tugasnya untuk melindungi, Negara harus:**

- (a) Menegakkan hukum yang ditujukan, atau memiliki dampak, untuk menuntut badan usaha agar menghormati hak asasi manusia, dan secara periodik menilai kecukupan hukum dan menangani kesenjangan yang ada;**
- (b) Memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang mengatur**

**pembentukan dan operasi badan usaha, seperti undang-undang perusahaan, tidak membatasi namun memungkinkan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia;**

- (c) Menyediakan panduan yang efektif bagi badan usaha tentang bagaimana menghormati hak asasi manusia dalam operasi mereka;**
- (d) Mendorong, dan jika patut, mensyaratkan badan usaha untuk mengomunikasikan cara mereka mengatasi dampak hak asasi manusia mereka.**

### *Penjelasan*

Negara tidak boleh berasumsi bahwa bisnis selalu lebih menyukai, atau mendapatkan keuntungan dengan tidak terlibatnya Negara, dan mereka harus mempertimbangkan untuk menerapkan kombinasi langkah-langkah yang cerdas - nasional dan internasional, wajib dan sukarela - untuk memupuk penghormatan bisnis terhadap hak asasi manusia.

Kegagalan untuk menegakkan hukum yang ada yang secara langsung dan tidak langsung mengatur penghormatan bisnis terhadap hak asasi manusia sering kali merupakan kesenjangan hukum yang signifikan dalam praktik Negara. Hukum tersebut mungkin berkisar mulai dari hukum nondiskriminasi dan ketenagakerjaan sampai hukum lingkungan, properti, privasi, dan antisuap. Oleh karena itu, penting bagi Negara untuk mempertimbangkan apakah hukum seperti itu saat ini telah ditegakkan secara efektif, dan apabila tidak, mengapa demikian, dan apa yang dapat dilakukan untuk mengoreksi situasi secara wajar.

Bagi Negara, penting juga untuk meninjau ulang apakah hukum-hukum ini menyediakan cakupan yang diperlukan mengingat perkembangan keadaan, dan apakah bersamaan dengan kebijakan yang ada, hukum-hukum yang ada menyediakan lingkungan yang kondusif bagi penghormatan bisnis terhadap hak asasi manusia. Misalnya, kejelasan yang lebih besar di bidang hukum dan kebijakan, seperti yang mengatur tentang akses terhadap tanah, termasuk hak terkait kepemilikan atau penggunaan tanah, sering kali penting untuk melindungi baik pemegang hak maupun badan usaha.

Hukum dan kebijakan yang mengatur pembentukan dan operasi badan usaha, seperti hukum perusahaan dan sekuritas, secara langsung membentuk perilaku bisnis. Namun, implikasinya terhadap hak asasi manusia masih kurang dipahami. Misalnya, dalam hukum perusahaan dan sekuritas ada ketidakjelasan terkait dengan apa yang diperbolehkan untuk

dilakukan oleh perusahaan atau pejabatnya sehubungan dengan hak asasi manusia, apalagi tentang apa yang diwajibkan. Hukum dan kebijakan dalam bidang ini harus menyediakan panduan yang memadai untuk memungkinkan perusahaan menghormati hak asasi manusia, dengan memperhatikan peran struktur kepengurusan yang ada seperti dewan perusahaan.

Panduan bagi badan usaha tentang menghormati hak asasi manusia harus mengindikasikan hasil yang diharapkan, dan membantu dengan berbagi praktik-praktik terbaik. Panduan ini harus memberikan saran tentang metode yang tepat, termasuk uji tuntas hak asasi manusia, dan cara mempertimbangkan secara efektif isu gender, kerentanan dan/atau marginalisasi, mengenali tantangan khusus yang mungkin dihadapi oleh masyarakat adat, perempuan, minoritas nasional atau etnis, minoritas agama dan bahasa, anak-anak, orang dengan disabilitas, dan pekerja migran dan keluarga mereka.

Lembaga hak asasi manusia nasional yang mematuhi Prinsip-Prinsip Paris memainkan peran yang penting dalam membantu Negara mengidentifikasi apakah hukum yang relevan selaras dengan kewajiban mereka di bidang hak asasi manusia dan apakah hukum tersebut ditegakkan secara efektif, dan dalam menyediakan panduan tentang hak asasi manusia bagi badan usaha dan aktor non-Negara.

Komunikasi oleh badan usaha tentang bagaimana mereka mengatasi dampak hak asasi manusia dapat berkisar mulai dari pelibatan informal dengan pemangku kepentingan yang terdampak sampai pelaporan publik yang formal. Dorongan Negara, atau jika pantas, tuntutan untuk komunikasi semacam ini adalah penting dalam memupuk penghormatan terhadap hak asasi manusia oleh badan usaha. Insentif untuk mengomunikasikan informasi yang memadai dapat mencakup ketentuan untuk memberikan bobot terhadap pelaporan mandiri seperti itu dalam hal terjadinya proses peradilan atau administratif. Tuntutan untuk berkomunikasi ini secara khusus dapat berguna jika sifat operasi bisnis atau konteks beroperasinya menimbulkan risiko yang signifikan terhadap hak asasi manusia. Kebijakan atau hukum dalam bidang ini biasanya dapat mengklarifikasi apa dan bagaimana bisnis harus berkomunikasi, membantu untuk memastikan aksesibilitas dan keakuratan komunikasi.

Setiap ketentuan tentang komunikasi yang memadai harus mempertimbangkan risiko yang mungkin ditimbulkannya terhadap keamanan dan keselamatan individu dan fasilitas; persyaratan yang sah

tentang kerahasiaan komersial; dan variasi dalam ukuran dan struktur perusahaan.

Persyaratan laporan keuangan harus mengklarifikasi bahwa dampak hak asasi manusia dalam beberapa hal dapat bersifat "materiel" atau "signifikan" terhadap kinerja ekonomi badan usaha.

## HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN BISNIS

- 4. Negara harus mengambil langkah-langkah perlindungan tambahan melawan pelanggaran hak asasi manusia oleh badan usaha yang dimiliki atau dikendalikan oleh Negara, atau yang menerima dukungan dan layanan substansial dari lembaga negara seperti lembaga kredit ekspor dan asuransi investasi resmi atau lembaga penjamin, termasuk, jika patut, mensyaratkan uji tuntas hak asasi manusia.**

### *Penjelasan*

Negara secara individual merupakan pengemban tugas utama di bawah hukum hak asasi manusia, dan secara bersama-sama mereka adalah wali dari sistem hak asasi manusia internasional. Apabila badan usaha dikendalikan oleh Negara atau tindakannya dapat diatributkan kepada Negara, pelanggaran hak asasi manusia oleh badan usaha dapat mencakup pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional Negara itu sendiri. Lebih dari itu, semakin dekat sebuah badan usaha kepada Negara, atau semakin besar ketergantungannya terhadap dukungan otoritas hukum atau pembayar pajak, semakin kuat alasan kebijakan Negara untuk memastikan perusahaan menghormati hak asasi manusia.

Jika Negara memiliki atau mengendalikan badan usaha, mereka memiliki sarana terbesar di bawah kekuasaannya untuk memastikan bahwa kebijakan, legislasi, dan peraturan yang relevan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia diterapkan. Manajemen senior biasanya melapor kepada lembaga Negara, dan kementerian pemerintah terkait memiliki cakupan lebih besar terhadap pemeriksaan dan pengawasan, termasuk memastikan bahwa uji tuntas hak asasi manusia diterapkan. (Perusahaan semacam ini juga tunduk terhadap tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, sebagaimana dibahas dalam bab II.)

Sejumlah lembaga yang terkait secara formal atau informal dengan Negara dapat menyediakan dukungan dan layanan terhadap kegiatan bisnis. Termasuk di sini lembaga kredit ekspor, asuransi investasi resmi atau lembaga penjamin, lembaga pengembangan, dan institusi keuangan

pembangunan. Ketika badan-badan ini tidak secara tegas mempertimbangkan dampak aktual dan potensial terhadap hak asasi manusia perusahaan penerima manfaat, mereka menempatkan dirinya pada risiko - dalam hal reputasi, keuangan, politik, dan hukum - karena mendukung risiko dampak tersebut, dan bahkan menambah tantangan hak asasi manusia yang dihadapi oleh Negara penerima.

Mengingat risiko ini, Negara harus mendorong, dan jika pantas, menuntut dilakukannya uji tuntas hak asasi manusia oleh badan-badan itu sendiri dan oleh badan usaha atau proyek yang menerima dukungan mereka. Tuntutan untuk melakukan uji tuntas hak asasi manusia sangat berguna saat sifat operasi bisnis atau konteks beroperasinya menimbulkan risiko yang signifikan terhadap hak asasi manusia.

- 5. Negara harus melaksanakan pengawasan yang cukup untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia internasional mereka ketika mereka mengontrak, atau membuat undang-undang bagi badan usaha untuk menyediakan layanan yang mungkin berdampak terhadap penikmatan hak asasi manusia.**

#### *Penjelasan*

Negara tidak melepaskan kewajiban mereka di bidang hak asasi manusia internasional ketika mereka memprivatisasi penyampaian layanan yang mungkin berdampak terhadap penikmatan hak asasi manusia. Kegagalan Negara untuk memastikan bahwa badan usaha yang melaksanakan layanan tersebut beroperasi dengan cara yang konsisten dengan kewajiban hak asasi manusia Negara, dapat mengakibatkan konsekuensi reputasi dan hukum bagi Negara itu sendiri. Sebagai suatu langkah yang penting, kontrak layanan terkait, atau legislasi yang memungkinkannya harus mengklarifikasi ekspektasi Negara agar perusahaan ini menghormati hak asasi manusia. Negara harus memastikan bahwa mereka dapat secara efektif mengawasi kegiatan perusahaan, termasuk melalui ketentuan mekanisme pemantauan dan akuntabilitas mandiri yang memadai.

- 6. Negara harus mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia oleh badan usaha dengan siapa mereka melakukan transaksi komersial.**

#### *Penjelasan*

Negara melakukan berbagai macam transaksi komersial dengan badan usaha, terutama melalui kegiatan pengadaannya. Hal ini memberikan Negara - secara individu dan secara kolektif - kesempatan unik untuk mendorong kesadaran

tentang dan penghormatan terhadap hak asasi manusia oleh perusahaan tersebut, termasuk melalui persyaratan kontrak, dengan memperhatikan kewajiban Negara yang relevan di bawah hukum nasional dan internasional.

## **MENDUKUNG PENGHORMATAN BISNIS TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH TERDAMPAK KONFLIK**

7. **Karena risiko pelanggaran berat hak asasi manusia meningkat di wilayah terdampak konflik, Negara harus membantu memastikan bahwa badan usaha yang beroperasi di wilayah tersebut tidak terlibat dengan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk dengan:**
  - (a) **Melibatkan diri sedini mungkin dengan badan usaha untuk membantu mereka mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi risiko terkait hak asasi manusia dalam kegiatan dan hubungan bisnis mereka;**
  - (b) **Menyediakan bantuan yang memadai bagi badan usaha untuk menilai dan mengatasi peningkatan risiko pelanggaran, dengan memperhatikan secara khusus kekerasan berbasis gender dan seksual.**
  - (c) **Menolak akses terhadap bantuan dan layanan publik bagi badan usaha yang terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia dan yang menolak untuk bekerja sama mengatasi situasi tersebut;**
  - (d) **Memastikan bahwa kebijakan, legislasi, peraturan, dan langkah-langkah penegakan efektif dalam mengatasi risiko keterlibatan bisnis dalam pelanggaran berat hak asasi manusia.**

### *Penjelasan*

Beberapa pelanggaran hak asasi manusia terburuk yang melibatkan bisnis terjadi di tengah konflik perebutan wilayah, sumber daya, atau Pemerintah itu sendiri - di mana sistem hak asasi manusia tidak dapat diharapkan berfungsi sebagaimana mestinya. Bisnis yang bertanggung jawab semakin mencari panduan Negara tentang cara menghindari berkontribusi terhadap kerugian hak asasi manusia dalam konteks yang sulit ini. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan yang inovatif dan praktis. Secara khusus, risiko kekerasan seksual dan berbasis gender, yang terutama sering terjadi di masa konflik, penting untuk diperhatikan.

Bagi semua Negara, menangani masalah-masalah dengan cepat sebelum situasi di lapangan memburuk adalah penting. Di wilayah terdampak konflik, Negara

"tuan rumah" mungkin tidak dapat melindungi hak asasi manusia secara memadai, karena kurangnya kendali yang efektif. Jika perusahaan transnasional terlibat, Negara "asal" mereka juga memainkan peran dalam membantu baik perusahaan maupun Negara tuan rumah untuk memastikan bahwa bisnis tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, sementara Negara tetangga dapat menyediakan dukungan tambahan yang penting.

Untuk mencapai koherensi kebijakan yang lebih baik dan membantu badan usaha dalam situasi tersebut secara lebih memadai, Negara asal harus memupuk kerja sama yang erat antara badan bantuan pembangunan mereka, kementerian luar negeri dan perdagangan, dan lembaga keuangan ekspor di ibukota mereka dan di kedutaan mereka, serta antar badan-badan ini dengan aktor Pemerintah tuan rumah; mengembangkan indikator peringatan dini untuk memberi peringatan kepada badan pemerintah dan badan usaha tentang adanya permasalahan; dan menerapkan konsekuensi sepiantasnya terhadap kegagalan perusahaan untuk bekerja sama dalam konteks ini, termasuk dengan menolak atau menarik dukungan atau layanan publik yang ada, atau jika hal itu tidak mungkin, menolak penyediaannya di masa mendatang.

Negara harus memperingatkan badan usaha tentang peningkatan risiko keterlibatan dengan pelanggaran berat hak asasi manusia di wilayah terdampak konflik. Mereka harus meninjau apakah kebijakan, legislasi, peraturan, dan langkah-langkah penegakan dapat menangani secara efektif risiko yang meningkat ini, termasuk melalui ketentuan uji tuntas hak asasi manusia oleh bisnis. Di mana adanya kesenjangan, Negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya. Hal ini dapat mencakup mengeksplorasi tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana bagi perusahaan yang berdomisili atau beroperasi di wilayah dan/atau yurisdiksi mereka yang melakukan atau berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Lebih dari itu, Negara juga harus mempertimbangkan pendekatan multilateral untuk mencegah dan menangani tindakan demikian, serta mendukung prakarsa kolektif yang efektif.

Semua langkah-langkah ini adalah tambahan terhadap kewajiban Negara di bawah hukum humaniter internasional dalam situasi konflik bersenjata, dan di bawah hukum pidana internasional.

## **MEMASTIKAN KOHERENSI KEBIJAKAN**

### **8. Negara harus memastikan bahwa kementerian, badan pemerintah, dan**

**lembaga berbasis Negara yang membentuk praktik bisnis menyadari dan memperhatikan kewajiban Negara di bidang hak asasi manusia ketika memenuhi mandat mereka masing-masing, termasuk dengan menyediakan informasi, pelatihan, dan dukungan yang relevan bagi mereka.**

### *Penjelasan*

Tidak ada ketegangan yang tidak terhindarkan antara kewajiban Negara di bidang hak asasi manusia dan hukum serta kebijakan yang mereka tetapkan yang membentuk praktik-praktik bisnis. Namun, terkadang Negara harus mengambil keputusan berimbang yang sulit untuk merekonsiliasi kebutuhan sosial yang berbeda-beda. Untuk mencapai keseimbangan yang pantas, Negara harus mengambil pendekatan meluas untuk menangani agenda bisnis dan hak asasi manusia, dengan tujuan memastikan koherensi kebijakan vertikal dan horizontal.

Koherensi kebijakan vertikal mengharuskan Negara memiliki kebijakan, peraturan, dan proses untuk melaksanakan kewajiban hak asasi manusia internasional mereka. Koherensi kebijakan horizontal berarti mendukung dan memperlengkapi kementerian dan lembaga, di tingkat nasional dan internasional, yang membentuk praktik-praktik bisnis - termasuk yang bertanggung jawab atas hukum perusahaan dan peraturan sekuritas, investasi, kredit ekspor dan asuransi, perdagangan dan ketenagakerjaan - untuk terinformasi dan bertindak dengan cara yang selaras dengan kewajiban hak asasi manusia Pemerintah.

**9. Negara harus memelihara ruang kebijakan domestik yang memadai untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia ketika mengejar tujuan kebijakan terkait bisnis dengan Negara atau badan usaha lain, misalnya melalui pakta investasi atau kontrak.**

### *Penjelasan*

Perjanjian ekonomi yang dilaksanakan oleh Negara, baik dengan Negara lain atau dengan badan usaha - seperti pakta investasi bilateral, perjanjian perdagangan bebas, atau kontrak untuk proyek investasi - menciptakan kesempatan ekonomi bagi Negara. Namun mereka juga dapat berdampak terhadap ruang kebijakan domestik Pemerintah. Misalnya, syarat perjanjian investasi internasional dapat membatasi Negara dalam mengimplementasi legislasi hak asasi manusia yang baru, atau menempatkan mereka dalam risiko arbitrase internasional yang mengikat jika mereka mengimplementasinya. Oleh karena itu, Negara harus memastikan bahwa mereka mempertahankan

kemampuan mereka untuk mengeluarkan kebijakan dan peraturan dalam rangka melindungi hak asasi manusia di bawah syarat perjanjian tersebut, sambil menyediakan perlindungan investor yang diperlukan.

**10. Ketika bertindak sebagai anggota lembaga multilateral yang berhubungan dengan isu terkait bisnis, Negara harus:**

- (a) Berusaha memastikan bahwa lembaga tersebut tidak membatasi kemampuan Negara anggotanya untuk memenuhi tugas mereka untuk melindungi hak asasi manusia, dan tidak menghalangi badan usaha dalam menghormati hak asasi manusia;**
- (b) Mendorong lembaga tersebut, dalam mandat dan kapasitas masing-masing, untuk mempromosikan penghormatan bisnis terhadap hak asasi manusia, dan jika diminta, membantu Negara memenuhi tugas mereka untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia oleh badan usaha, termasuk melalui bantuan teknis, pengembangan kapasitas, dan peningkatan kesadaran;**
- (c) Memanfaatkan Prinsip-Prinsip Panduan untuk mempromosikan pemahaman bersama dan memajukan kerja sama internasional dalam mengelola tantangan bisnis dan hak asasi manusia.**

*Penjelasan*

Koherensi kebijakan yang lebih besar juga dibutuhkan di tingkat internasional, termasuk ketika Negara berpartisipasi dalam lembaga multilateral yang berurusan dengan isu terkait bisnis, seperti lembaga perdagangan dan keuangan internasional. Negara tetap memegang kewajiban mereka di bidang hak asasi manusia internasional ketika mereka berpartisipasi dalam lembaga semacam ini.

Pengembangan kapasitas dan peningkatan kesadaran melalui lembaga semacam ini dapat memainkan peran yang penting dalam membantu semua Negara memenuhi tugas mereka untuk melindungi, termasuk dengan memungkinkan mereka berbagi informasi tentang tantangan dan praktik-praktik terbaik, sehingga mempromosikan pendekatan yang lebih konsisten. Tindakan kolektif melalui lembaga multilateral dapat membantu Negara menyamakan kedudukan sehubungan dengan penghormatan bisnis terhadap hak asasi manusia, namun Negara harus melakukannya dengan cara meningkatkan kinerja yang tertinggal. Kerja sama antar Negara, lembaga multilateral dan pemangku kepentingan lainnya juga dapat memainkan peran

yang penting.

Prinsip-Prinsip Panduan ini menyediakan titik referensi umum dalam hal ini, dan dapat berfungsi sebagai dasar yang bermanfaat untuk membangun dampak positif kumulatif yang mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan terkait.

## II. KEWAJIBAN PERUSAHAAN UNTUK MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA

### A. PRINSIP-PRINSIP MENDASAR

- 11. Badan usaha harus menghormati hak asasi manusia. Hal ini berarti bahwa mereka harus menghindari melanggar hak asasi manusia orang lain dan harus mengatasi dampak buruk terhadap hak asasi manusia di mana mereka terlibat.**

#### *Penjelasan*

Tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia merupakan standar global perilaku yang diharapkan dari semua badan usaha di mana pun mereka beroperasi. Tanggung jawab ini berdiri terpisah dari kemampuan dan/atau ketersediaan Negara untuk memenuhi kewajiban mereka di bidang hak asasi manusia, dan tidak mengurangi kewajiban tersebut. Tanggung jawab ini juga berada di atas dan melampaui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional yang melindungi hak asasi manusia.

Mengatasi dampak hak asasi manusia yang merugikan memerlukan tindakan yang memadai untuk pencegahan, mitigasi, dan jika patut, remediasi.

Badan usaha mungkin mengambil komitmen atau kegiatan lain untuk mendukung dan mempromosikan hak asasi manusia, yang mungkin berkontribusi terhadap penikmatan hak. Namun hal ini tidak mengimbangi kegagalan mereka untuk menghormati hak asasi manusia sepanjang operasi mereka.

Badan hukum tidak boleh mengurangi kemampuan Negara untuk memenuhi sendiri kewajibannya di bidang hak asasi manusia, termasuk melalui tindakan yang mungkin melemahkan integritas proses yudisial.

- 12. Tanggung jawab badan usaha untuk menghormati hak asasi manusia mengacu pada hak asasi manusia yang diakui secara internasional - minimal dipahami sebagai hak yang dituangkan dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan prinsip-prinsip terkait hak-hak mendasar yang dituangkan dalam Deklarasi Organisasi Perburuhan Internasional tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja.**

### *Penjelasan*

Karena badan usaha dapat berdampak terhadap hampir semua spektrum hak asasi manusia yang diakui secara internasional, tanggung jawab mereka untuk menghormatinya berlaku juga kepada semua hak-hak tersebut. Dalam praktiknya, beberapa hak asasi manusia mungkin berada pada risiko lebih besar dari lainnya di industri atau konteks tertentu, dan oleh karenanya akan menjadi fokus perhatian yang meningkat. Namun demikian, situasi dapat berubah, jadi semua hak asasi manusia harus menjadi subjek tinjauan periodik.

Daftar yang andal berisi hak asasi manusia inti yang diakui secara internasional tercakup dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (terdiri dari Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan instrumen utamanya dengan mana ia dikodifikasi: Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), dipadukan dengan prinsip-prinsip mengenai hak-hak mendasar dalam delapan konvensi inti ILO sebagaimana diuraikan dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja. Ini adalah tolok ukur yang digunakan aktor sosial lainnya dalam menilai dampak hak asasi manusia terhadap badan usaha. Tanggung jawab badan usaha untuk menghormati hak asasi manusia berbeda dari masalah tanggung jawab dan penegakan, yang tetap ditentukan oleh ketentuan hukum nasional di yurisdiksi terkait.

Tergantung pada keadaan, badan usaha mungkin perlu mempertimbangkan standar tambahan. Misalnya perusahaan harus menghormati hak asasi individu yang berasal dari kelompok atau masyarakat tertentu yang membutuhkan perhatian khusus, di mana mereka mungkin memiliki dampak hak asasi manusia yang merugikan. Dalam hubungannya dengan hal ini, instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menguraikan lebih lanjut tentang hak-hak masyarakat adat; perempuan, minoritas nasional atau etnis, agama atau bahasa; anak-anak; orang dengan disabilitas; dan pekerja migran dan keluarga mereka. Lebih dari itu, dalam situasi konflik bersenjata, perusahaan harus menghormati standar hukum humaniter internasional.

- 13. Tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia menuntut agar badan usaha:**
- (a) Menghindar dari menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak hak asasi manusia yang merugikan melalui kegiatan mereka, dan mengatasi dampak tersebut apabila terjadi;**
  - (b) Berusaha mencegah atau mengurangi dampak hak asasi manusia yang merugikan yang terkait langsung dengan operasi, produk, atau layanan mereka, atau oleh hubungan bisnis mereka, walaupun mereka tidak berkontribusi terhadap dampak tersebut.**

#### *Penjelasan*

Badan usaha mungkin terlibat dengan dampak hak asasi manusia yang merugikan, entah melalui kegiatan mereka sendiri maupun sebagai akibat hubungan bisnis mereka dengan pihak lain. Prinsip Panduan 19 menguraikan lebih jauh tentang implikasi bagaimana badan usaha harus mengatasi situasi ini. Dalam kerangka Prinsip-Prinsip Panduan ini, "kegiatan" badan usaha dipahami mencakup baik tindakan maupun kelalaian; dan "hubungan bisnis" dipahami mencakup hubungan dengan mitra bisnis, entitas dalam rantai nilainya, dan entitas non-Negara maupun Negara lain yang secara langsung terkait dengan operasi, produk, atau layanan bisnisnya.

- 14. Tanggung jawab badan usaha untuk menghormati hak asasi manusia berlaku untuk semua perusahaan tanpa memandang ukuran, sektor, konteks operasional, dan strukturnya. Namun demikian, skala dan kompleksitas sarana yang digunakan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut dapat bervariasi menurut faktor ini, dan dengan tingkat keparahan dampak merugikan perusahaan terhadap hak asasi manusia.**

#### *Penjelasan*

Sarana yang digunakan badan usaha untuk memenuhi tanggung jawabnya menghormati hak asasi manusia akan proporsional terhadap, salah satunya, ukurannya. Perusahaan kecil dan menengah mungkin memiliki kapasitas lebih kecil serta proses dan struktur manajemen yang lebih informal daripada perusahaan besar, sehingga kebijakan dan proses masing-masing akan berbeda. Namun beberapa perusahaan kecil dan menengah dapat memiliki dampak hak asasi manusia yang merugikan, hal mana membutuhkan tindakan yang sesuai, terlepas dari ukurannya. Tingkat

keparahan dampak akan diukur berdasarkan skala, cakupan, dan sifatnya yang tidak dapat diperbaiki. Cara sebuah badan usaha memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia juga dapat berbeda-beda, tergantung apakah, dan sejauh apa perusahaan tersebut melaksanakan bisnis melalui kelompok perusahaan atau secara individu. Namun, seluruh tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia berlaku penuh dan secara setara terhadap semua badan usaha.

**15. Untuk dapat memenuhi tanggung jawab mereka dalam menghormati hak asasi manusia, badan usaha harus memiliki kebijakan dan proses yang sesuai dengan ukuran dan kondisinya, termasuk:**

- (a) Kebijakan komitmen untuk memenuhi tanggung jawab mereka menghormati hak asasi manusia;
- (b) Proses uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan mempertanggungjawabkan bagaimana mereka mengatasi dampak mereka terhadap hak asasi manusia;
- (c) Proses untuk memungkinkan remediasi atas segala dampak terhadap hak asasi manusia merugikan yang disebabkan atau dikontribusikan oleh perusahaan.

### *Penjelasan*

Badan usaha perlu tahu dan menunjukkan bahwa mereka menghormati hak asasi manusia. Mereka tidak dapat melakukan hal tersebut jika tidak memiliki kebijakan dan proses tertentu. Prinsip-prinsip 16 sampai 24 menguraikan lebih jauh tentang hal ini.

## **B. PRINSIP-PRINSIP**

### **OPERASIONAL**

#### **KOMITMEN KEBIJAKAN**

**16. Sebagai dasar menanamkan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia, badan usaha harus mengungkapkan komitmen mereka untuk memenuhi tanggung jawab ini melalui sebuah pernyataan kebijakan yang:**

- (a) Disetujui di tingkat paling senior dari badan usaha tersebut;

- (b) Didasarkan pada keahlian internal dan/atau eksternal yang relevan;**
- (c) Menentukan tuntutan bidang hak asasi manusia terhadap personel, mitra bisnis, dan pihak lainnya yang secara langsung terkait dengan operasi, produk atau layanannya;**
- (d) Tersedia secara publik dan dikomunikasikan secara internal dan eksternal kepada semua personel, mitra bisnis, dan pihak relevan lainnya;**
- (e) Tercermin dalam kebijakan dan prosedur operasional yang diperlukan untuk menanamkannya di seluruh badan usaha.**

### *Penjelasan*

Istilah "pernyataan" digunakan secara umum, untuk mendeskripsikan sarana apa pun yang digunakan oleh perusahaan untuk menetapkan secara publik tanggung jawab, komitmen, dan tuntutan mereka.

Tingkat keahlian yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa pernyataan kebijakan memiliki dasar yang baik akan bervariasi tergantung pada kompleksitas operasi badan usaha. Keahlian dapat diambil dari berbagai sumber, mulai dari sumber dalam jaringan atau sumber tertulis yang kredibel, sampai konsultasi dengan ahli yang diakui.

Pernyataan komitmen tersebut harus tersedia secara publik. Pernyataan ini juga harus dikomunikasikan secara aktif kepada entitas dengan mana perusahaan memiliki hubungan kontrak; entitas yang terhubung langsung dengan operasi mereka; yang mungkin mencakup pasukan keamanan negara; investor; dan, dalam hal beroperasi dengan risiko hak asasi manusia yang signifikan, kepada pemangku kepentingan yang mungkin akan terdampak.

Komunikasi internal dari pernyataan dan kebijakan serta prosedur terkait harus memperjelas jalur dan sistem akuntabilitas, dan harus didukung dengan pelatihan yang diperlukan bagi personel dalam fungsi bisnis yang relevan.

Sebagaimana Negara harus bekerja menuju koherensi kebijakan, demikian juga badan usaha harus berupaya mencapai koherensi antara tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia dan kebijakan serta prosedur yang mengatur kegiatan dan hubungan bisnis mereka yang lebih luas. Hal ini harus mencakup, misalnya, kebijakan dan prosedur yang menetapkan insentif keuangan dan kinerja lainnya bagi personel; praktik pengadaan; dan kegiatan lobi yang mempertaruhkan hak asasi manusia.

Melalui sarana ini dan sarana yang pantas lainnya, pernyataan kebijakan harus ditanamkan mulai dari bagian atas badan usaha sampai ke seluruh fungsinya, yang mungkin dapat bertindak tanpa pengetahuan tentang atau perhatian terhadap hak asasi manusia.

## UJI TUNTAS HAK ASASI MANUSIA

- 17. Untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan mempertanggungjawabkan bagaimana mereka mengatasi dampak mereka terhadap hak asasi manusia, badan usaha harus melaksanakan uji tuntas hak asasi manusia. Proses ini harus mencakup penilaian dampak hak asasi manusia baik yang nyata maupun potensial, mengintegrasikan dan bertindak atas temuan, melacak respons, dan mengomunikasikan bagaimana dampak tersebut diatasi. Uji tuntas hak asasi manusia:**
- (a) **Harus mencakup dampak hak asasi manusia yang merugikan yang disebabkan atau dikontribusikan oleh badan usaha melalui kegiatannya sendiri, atau yang mungkin terkait langsung dengan operasi, produk, atau layanan hubungan bisnisnya;**
  - (b) **Akan bervariasi dalam kompleksitasnya dengan perbedaan ukuran badan usaha, risiko dampak hak asasi manusia yang parah, serta sifat dan konteks operasinya;**
  - (c) **Harus berkelanjutan, menyadari bahwa risiko hak asasi manusia dapat berubah seiring waktu dengan berkembangnya operasi dan konteks operasi badan usaha.**

### *Penjelasan*

Prinsip-prinsip ini mendefinisikan parameter dari uji tuntas hak asasi manusia, sementara Prinsip-Prinsip 18-21 menguraikan komponen esensialnya.

Risiko hak asasi manusia dipahami sebagai potensi dampak merugikan badan usaha terhadap hak asasi manusia. Potensi dampak harus diatasi melalui pencegahan atau mitigasi, sementara dampak aktual - yang telah terjadi - harus menjadi subjek remediasi (Prinsip 22).

Uji tuntas hak asasi manusia dapat dicakup dalam sistem manajemen perusahaan yang lebih luas, dengan syarat sistem tersebut tidak hanya mengidentifikasi dan mengelola risiko materiel terhadap perusahaan itu sendiri, tapi juga mencakup risiko terhadap pemegang hak.

Uji tuntas hak asasi manusia harus diinisiasi sedini mungkin dalam pengembangan kegiatan atau hubungan baru, mengingat bahwa risiko hak asasi manusia dapat meningkat atau dikurangi sejak tahap membentuk kontrak atau perjanjian lainnya, dan dapat diwariskan melalui merger atau akuisisi.

Jika badan usaha memiliki sejumlah besar entitas dalam rantai nilai mereka, mungkin akan sangat sulit untuk melaksanakan uji tuntas atas dampak merugikan terhadap hak asasi manusia di seluruh rantai tersebut. Dalam hal ini, badan usaha harus mengidentifikasi area umum di mana risiko dampak merugikan hak asasi manusia adalah paling signifikan, baik karena konteks operasi pemasok atau klien tertentu, operasi itu sendiri, produk atau layanan yang terlibat, atau pertimbangan relevan lainnya, dan memprioritaskan area ini untuk uji tuntas hak asasi manusia.

Pertanyaan tentang keterlibatan mungkin akan muncul ketika badan usaha berkontribusi terhadap, atau tampak berkontribusi terhadap dampak merugikan hak asasi manusia yang disebabkan oleh pihak lain. Keterlibatan memiliki pengertian legal dan nonlegal. Secara nonlegal, badan usaha dapat dipandang seakan terlibat dalam tindakan pihak lain apabila, misalnya, mereka tampak memperoleh manfaat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tersebut.

Secara legal, sebagian besar yurisdiksi nasional melarang keterlibatan dalam perbuatan pidana, dan beberapa mengizinkan pelimpahan tanggung jawab pidana terhadap badan usaha dalam kasus tersebut. Biasanya, tindakan perdata juga dapat didasarkan pada tuduhan kontribusi suatu perusahaan terhadap kerugian, walaupun mungkin tidak dalam kerangka hak asasi manusia. Bobot yurisprudensi hukum pidana internasional mengindikasikan bahwa standar terkait membantu dan bersekongkol adalah dengan sadar menyediakan bantuan praktis atau dorongan yang berdampak substansial terhadap perbuatan sebuah tindak pidana.

Pelaksanaan uji tuntas hak asasi manusia secara patut dapat membantu badan usaha mengatasi risiko klaim hukum melawan mereka dengan menunjukkan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah sewajarnya untuk menghindari keterlibatan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang dituduhkan. Namun demikian, badan usaha yang melaksanakan uji tuntas semacam ini tidak boleh berasumsi bahwa, dengan sendirinya, hal ini secara otomatis dan secara utuh membebaskan mereka dari tanggung jawab menyebabkan atau berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

- 18. Untuk mengukur risiko hak asasi manusia, badan usaha harus mengidentifikasi dan menilai segala dampak merugikan hak asasi manusia yang nyata maupun potensial di mana mereka mungkin dapat terlibat baik melalui kegiatan mereka sendiri atau sebagai hasil hubungan bisnis mereka. Proses ini harus:**
- (a) Didasarkan pada keahlian hak asasi manusia internal dan/atau eksternal yang mandiri;**
  - (b) Melibatkan konsultasi yang bermakna dengan kelompok yang berpotensi terdampak serta badan usaha relevan lainnya, sesuai dengan ukuran badan usaha dan sifat serta konteks operasi.**

### *Penjelasan*

Langkah pertama dalam melaksanakan uji tuntas hak asasi manusia adalah mengidentifikasi dan menilai sifat dampak merugikan terhadap hak asasi manusia yang nyata maupun potensial di mana badan usaha mungkin terlibat. Tujuannya adalah memahami dampak spesifik terhadap orang-orang tertentu, menimbang konteks tertentu operasi. Biasanya ini termasuk menilai konteks hak asasi manusia sebelum kegiatan bisnis yang diajukan, jika mungkin; mengidentifikasi siapa yang mungkin terkena dampak; mendata standar dan masalah hak asasi manusia yang relevan; dan memperkirakan bagaimana kegiatan yang diajukan serta hubungan bisnis yang terkait dengannya dapat menimbulkan dampak hak asasi manusia yang merugikan terhadap mereka yang telah diidentifikasi.

Dalam proses ini, badan usaha harus memberi perhatian khusus terhadap dampak hak asasi manusia tertentu terhadap individu atau kelompok atau masyarakat yang mungkin berada pada risiko kerentanan atau marginalisasi yang meningkat, dan tetap mengingat berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh perempuan dan laki-laki.

Walaupun proses untuk menilai dampak hak asasi manusia dapat disertakan dengan proses lain seperti asesmen risiko atau asesmen dampak lingkungan dan sosial, proses ini harus mencakup semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional sebagai titik referensi, mengingat bahwa perusahaan berpotensi berdampak terhadap hampir semua hak-hak tersebut.

Karena situasi hak asasi manusia itu dinamis, penilaian dampak hak asasi manusia harus dilaksanakan dalam interval yang teratur: sebelum memulai suatu kegiatan atau hubungan yang baru; sebelum mengambil keputusan atau membuat perubahan besar dalam operasi (mis. masuk pasar,

peluncuran produk, perubahan kebijakan, atau perubahan yang lebih meluas terhadap bisnis); merespons terhadap atau mengantisipasi perubahan di lingkungan operasi (mis. peningkatan ketegangan sosial); dan secara periodik selama masa berjalannya kegiatan atau hubungan.

Untuk memungkinkan badan usaha menilai dampak hak asasi manusia mereka secara akurat, mereka harus berusaha untuk memahami kekhawatiran dari pemangku kepentingan yang berpotensi terdampak, dengan berkonsultasi dengan mereka secara langsung dengan cara yang mempertimbangkan halangan bahasa dan potensi halangan terhadap keterlibatan yang efektif lainnya. Dalam situasi di mana konsultasi semacam ini tidak memungkinkan, badan usaha harus mempertimbangkan alternatif wajar lainnya seperti berkonsultasi dengan narasumber ahli yang kredibel dan mandiri, termasuk pembela hak asasi manusia dan anggota masyarakat sipil lainnya.

Penilaian terhadap dampak hak asasi manusia memberikan dasar bagi langkah-langkah berikutnya dalam proses uji tuntas hak asasi manusia.

**19. Untuk mencegah dan mengurangi dampak merugikan terhadap hak asasi manusia, badan usaha harus mengintegrasikan temuan dari asesmen dampak mereka lintas fungsi dan proses internal yang relevan, dan mengambil tindakan yang sesuai.**

**(a) Integrasi efektif menuntut agar:**

- (i) Tanggung jawab untuk mengatasi dampak tersebut ditugaskan kepada tingkat dan fungsi yang tepat dalam badan usaha;
- (ii) Pengambilan keputusan, alokasi anggaran, dan proses pengawasan internal memungkinkan respons efektif terhadap dampak semacam itu.

**(b) Tindakan yang tepat akan bervariasi berdasarkan:**

- (i) Apakah badan usaha menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak yang merugikan, atau apakah mereka terlibat semata-mata karena dampaknya terkait langsung dengan operasi, produk, atau layanan hubungan bisnisnya;
- (ii) Sejauh mana pengaruhnya dalam mengatasi dampak merugikan tersebut.

### *Penjelasan*

Integrasi horizontal lintas badan usaha atas temuan spesifik dari asesmen

dampak hak asasi manusia hanya bisa efektif jika komitmen kebijakan hak asasi manusia telah ditanamkan di dalam semua fungsi bisnis yang relevan. Hal ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa temuan asesmen dipahami secara benar, diberi bobot yang pantas, dan ditindaklanjuti.

Dalam menilai dampak hak asasi manusia, badan usaha harus mencari dampak merugikan yang nyata maupun potensial. Dampak potensial haruslah dicegah atau dikurangi melalui integrasi horizontal temuan lintas badan usaha, sedangkan dampak nyata - yang sudah terjadi - harus menjadi subjek remediasi (Prinsip 22).

Ketika badan usaha menyebabkan atau mungkin menyebabkan dampak hak asasi manusia yang merugikan, mereka harus mengambil langkah-langkah yang pantas untuk menghentikan atau mencegah dampak.

Ketika sebuah badan usaha berkontribusi atau mungkin berkontribusi terhadap dampak merugikan terhadap hak asasi manusia, perusahaan ini harus mengambil langkah-langkah yang pantas untuk menghentikan atau mencegah kontribusi mereka dan menggunakan pengaruhnya untuk memitigasi dampak tersisa sedapat mungkin. Perusahaan dianggap memiliki pengaruh jika mereka memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan terhadap praktik-praktik yang salah dari suatu entitas yang menyebabkan kerugian.

Apabila suatu badan usaha tidak berkontribusi terhadap dampak terhadap hak asasi manusia yang merugikan, namun dampak itu bagaimanapun terkait langsung dengan operasi, produk, atau layanan hubungan bisnisnya dengan entitas lain, situasinya menjadi lebih rumit. Dari antara faktor yang menentukan tindakan yang tepat dalam situasi semacam ini adalah pengaruh perusahaan terhadap entitas yang terlibat, seberapa penting hubungannya bagi perusahaan, tingkat keparahan pelanggaran, dan apakah keputusan hubungan dengan entitas tersebut akan menimbulkan konsekuensi dampak hak asasi manusia yang merugikan.

Semakin rumit situasinya dan implikasinya terhadap hak asasi manusia, semakin kuat alasan bagi perusahaan untuk mencari nasihat seorang ahli dalam memutuskan bagaimana harus merespons.

Jika badan usaha memiliki pengaruh untuk mencegah atau mengurangi dampak yang merugikan, perusahaan harus menggunakannya. Jika perusahaan tidak memiliki pengaruh, mungkin masih ada cara bagi perusahaan untuk meningkatkan pengaruhnya. Pengaruh mungkin dapat ditingkatkan, misalnya, dengan menawarkan pengembangan kapasitas atau insentif lainnya kepada entitas terkait, atau kerja sama dengan aktor lain.

Ada juga beberapa situasi di mana perusahaan kurang memiliki pengaruh untuk mencegah atau memitigasi dampak yang merugikan dan tidak dapat meningkatkan pengaruhnya. Dalam hal ini, perusahaan harus mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungan mereka, dengan mempertimbangkan asesmen yang kredibel tentang dampak merugikan terhadap hak asasi manusia akibat pengakhiran hubungan tersebut.

Apabila hubungannya penting bagi perusahaan, pengakhirannya dapat menimbulkan tantangan lebih jauh. Sebuah hubungan dapat dianggap penting jika menyediakan sebuah produk atau layanan yang penting bagi bisnis perusahaan, dan tidak ada sumber alternatif lain yang wajar. Di sini, tingkat keparahan dari dampak hak asasi manusia juga harus dipertimbangkan: semakin parah pelanggarannya, semakin cepat perusahaan harus melihat perubahan sebelum mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungannya atau tidak. Bagaimanapun, selama pelanggaran berlanjut, dan perusahaan tetap mempertahankan hubungannya, perusahaan harus dapat mendemonstrasikan upayanya sendiri untuk memitigasi dampak dan bersiap untuk menerima konsekuensi apa pun - secara reputasi, finansial, maupun legal - dari hubungan yang terus berlanjut.

**20. Untuk dapat memverifikasi apakah dampak hak asasi manusia yang merugikan tersebut diatasi, badan usaha harus melacak efektivitas respons mereka. Pelacakan harus:**

- (a) Didasarkan pada indikator kualitatif dan kuantitatif yang tepat;**
- (b) Memanfaatkan umpan balik dari sumber internal dan eksternal, termasuk pemangku kepentingan yang terdampak.**

### *Penjelasan*

Pelacakan adalah penting agar badan usaha dapat mengetahui apakah kebijakan hak asasi manusianya diimplementasi secara optimal, apakah mereka telah merespons secara efektif terhadap dampak hak asasi manusia yang telah diidentifikasi, dan mendorong perbaikan yang berkelanjutan.

Badan usaha harus membuat upaya khusus untuk melacak efektivitas respons mereka terhadap dampak terhadap individu dari kelompok atau masyarakat yang mungkin berada pada risiko kerentanan atau marginalisasi yang meningkat.

Pelacakan harus terintegrasi dalam proses laporan internal yang relevan.

Badan usaha mungkin menggunakan perangkat yang sudah mereka gunakan sehubungan dengan permasalahan lain. Hal ini dapat termasuk kontrak dan tinjauan kinerja serta survei dan audit, menggunakan data yang dipilah berdasarkan gender jika relevan. Mekanisme pengaduan tingkat operasional juga dapat menyediakan umpan balik yang penting tentang efektivitas uji tuntas hak asasi manusia badan usaha dari mereka yang terdampak secara langsung (lihat Prinsip 29).

**21. Dalam rangka mempertanggungjawabkan bagaimana mereka mengatasi dampak hak asasi manusia, badan usaha harus siap untuk mengomunikasikannya secara eksternal, terutama ketika ada kekhawatiran yang diangkat oleh atau atas nama pemangku kepentingan yang terdampak. Badan usaha yang operasinya atau konteks operasinya menimbulkan risiko dampak hak asasi manusia yang parah harus melaporkan secara formal cara mereka mengatasinya. Dalam semua kasus, komunikasi harus:**

- (a) Memiliki bentuk dan frekuensi yang mencerminkan dampak hak asasi manusia sebuah perusahaan dan yang dapat diakses oleh audiensi yang dituju;
- (b) Menyediakan informasi yang memadai untuk mengevaluasi kecukupan respons perusahaan terhadap dampak hak asasi manusia terkait;
- (c) Sebaliknya tidak menimbulkan risiko bagi pemangku kepentingan, personel, atau terhadap persyaratan sah tentang kerahasiaan komersial.

### *Penjelasan*

Tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia menuntut badan usaha memiliki kebijakan dan proses dengan mana mereka dapat mengetahui dan menunjukkan bahwa mereka menghormati hak asasi manusia dalam praktiknya. Menunjukkan artinya komunikasi, menyediakan suatu ukuran transparansi dan akuntabilitas bagi individu atau kelompok yang mungkin terdampak dan pemangku kepentingan relevan lain termasuk investor.

Bentuk komunikasi dapat bervariasi, termasuk pertemuan tatap muka, dialog dalam jaringan, konsultasi dengan pemangku kepentingan yang terdampak, dan laporan publik formal. Laporan formal itu sendiri masih

berkembang, mulai dari laporan tahunan tradisional dan laporan pertanggungjawaban/keberlanjutan perusahaan, menjadi mencakup pembaruan dalam jaringan dan laporan finansial dan non-finansial terintegrasi.

Laporan formal oleh perusahaan dituntut dalam hal adanya risiko dampak hak asasi manusia yang berat, baik akibat sifat dari operasi bisnis maupun konteks beroperasi. Laporan ini harus mencakup topik dan indikator tentang bagaimana perusahaan mengidentifikasi dan mengatasi dampak merugikan terhadap hak asasi manusia. Verifikasi mandiri terhadap laporan hak asasi manusia dapat memperkuat konten dan kredibilitasnya. Indikator sektor tertentu dapat menyediakan rincian tambahan yang berguna.

## REMEDIASI

**22. Ketika badan usaha mengidentifikasi bahwa mereka telah menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak yang merugikan, mereka harus memastikan atau bekerja sama dalam upaya remediasi melalui proses yang sah.**

### *Penjelasan*

Bahkan dengan kebijakan dan praktik terbaik, sebuah badan usaha dapat menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak hak asasi manusia yang merugikan yang tidak diperkirakannya atau tidak dapat dicegah olehnya.

Apabila badan usaha mengidentifikasi situasi semacam ini, baik melalui proses uji tuntas hak asasi manusia atau sarana lain, tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia menuntut keterlibatan aktif dalam remediasi, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan aktor lain. Mekanisme pengaduan tingkat operasional bagi mereka yang berpotensi terdampak oleh kegiatan badan usaha dapat menjadi salah satu cara efektif untuk memungkinkan remediasi ketika memenuhi kriteria tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Prinsip 31.

Ketika terjadi dampak merugikan yang tidak disebabkan atau dikontribusi oleh badan usaha, namun yang secara langsung terkait dengan operasi, produk, atau layanan oleh salah satu hubungan bisnisnya, tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia tidak menuntut agar perusahaan itu sendiri menyediakan remediasi, namun dapat mengambil peran dalam pelaksanaannya.

Beberapa situasi, khususnya di mana ada tuduhan tindak pidana, biasanya menuntut kerja sama dengan mekanisme yudisial.

Panduan lebih jauh tentang mekanisme dengan mana pemulihan dapat diupayakan, termasuk ketika tuduhan tentang dampak hak asasi manusia dibantah, terkandung dalam bab III tentang akses terhadap pemulihan.

## PERMASALAHAN KONTEKS

### 23. Dalam semua konteks, badan usaha harus:

- (a) Mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional, di mana pun mereka beroperasi;
- (b) Mencari cara untuk menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional ketika menghadapi tuntutan yang bertentangan;
- (c) Memperlakukan risiko untuk menyebabkan atau berkontribusi terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai masalah kepatuhan hukum di mana pun mereka beroperasi.

### *Penjelasan*

Walaupun sebuah negara tertentu dan konteks lokalnya dapat memengaruhi risiko hak asasi manusia dari kegiatan dan hubungan bisnis sebuah perusahaan, semua badan usaha memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghormati hak asasi manusia di mana pun mereka beroperasi. Ketika konteks domestik tidak memungkinkan pemenuhan tanggung jawab ini secara penuh, badan usaha dituntut untuk menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional sedapat mungkin dalam kondisi tersebut, dan dapat mendemonstrasikan upaya mereka dalam hal ini.

Beberapa lingkungan operasi, seperti wilayah terdampak konflik, mungkin meningkatkan risiko perusahaan terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan oleh aktor lain (pasukan keamanan, misalnya). Badan usaha harus memperlakukan risiko ini sebagai masalah kepatuhan hukum, mengingat meluasnya jaringan potensi tanggung jawab hukum perusahaan yang timbul dari klaim perdata di luar wilayah, dan dari penggabungan ketentuan Statuta Roma Pengadilan Pidana Internasional di yurisdiksi yang melayani tanggung jawab pidana perusahaan. Selain itu, direktur, pejabat, dan pegawai perusahaan dapat dikenakan tanggung jawab individu untuk tindakan yang merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia.

Dalam konteks yang kompleks seperti ini, badan usaha harus memastikan bahwa mereka tidak memperparah situasi. Dalam menilai bagaimana cara merespons paling baik, mereka sering kali akan dinasihati untuk tidak hanya memanfaatkan keahlian dan konsultasi lintas fungsi di dalam perusahaan, namun juga untuk berkonsultasi secara eksternal dengan ahli yang kredibel dan independen, termasuk dari Pemerintah, masyarakat sipil, lembaga hak asasi manusia nasional, dan prakarsa multipemangku kepentingan yang relevan.

**24. Jika perlu untuk memprioritaskan tindakan untuk mengatasi dampak merugikan yang nyata dan potensial terhadap hak asasi manusia, badan usaha harus pertama-tama berupaya untuk mencegah dan mengurangi dampak yang paling parah, atau yang penundaan responsnya akan menjadikannya tidak dapat diperbaiki.**

#### *Penjelasan*

Walaupun badan usaha harus mengatasi dampak merugikan terhadap hak asasi manusia, mengatasinya secara bersamaan tidak selalu memungkinkan. Dalam hal tidak adanya panduan hukum khusus, jika harus memprioritaskan masalah, badan usaha harus mulai dengan dampak hak asasi manusia yang paling parah, dengan menyadari bahwa respons yang tertunda dapat memengaruhi kemampuan untuk meremediasi. Tingkat keparahan bukan merupakan konsep yang mutlak dalam konteks ini, namun relatif terhadap dampak hak asasi manusia lainnya yang telah diidentifikasi oleh badan usaha.

### **III. AKSES TERHADAP PEMULIHAN**

#### **A. PRINSIP-PRINSIP MENDASAR**

**25. Sebagai bagian dari tugas mereka melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia yang terkait bisnis, Negara harus mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan, melalui sarana yudisial, administratif, legislatif maupun saran yang sesuai lainnya, bahwa ketika pelanggaran semacam itu terjadi di wilayah dan/atau yurisdiksi mereka, orang-orang yang terkena dampak memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif.**

#### *Penjelasan*

Apabila Negara tidak mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelidiki, menghukum, dan memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia oleh bisnis ketika pelanggaran itu terjadi, tugas Negara dapat menjadi lemah atau bahkan tidak

ada artinya.

Akses terhadap pemulihan yang efektif memiliki aspek prosedural dan substantif. Pemulihan yang disediakan melalui mekanisme pengaduan yang dibahas dalam bagian ini dapat memiliki berbagai bentuk substantif, yang secara umum tujuannya adalah menetralkan atau memperbaiki kerugian hak asasi manusia yang telah terjadi. Pemulihan dapat berupa permintaan maaf, restitusi, rehabilitasi, kompensasi finansial maupun nonfinansial, dan sanksi hukuman (baik pidana maupun administratif, seperti denda), serta pencegahan kerugian, misalnya melalui perintah [penghentian] atau jaminan untuk tidak mengulang. Prosedur untuk penyediaan pemulihan tidak boleh memihak, harus terlindungi dari korupsi dan bebas dari upaya politis atau upaya lainnya untuk memengaruhi hasilnya.

Dalam kerangka Prinsip-Prinsip Panduan ini, suatu pengaduan dipahami sebagai ketidakadilan yang dirasakan oleh seseorang atau suatu kelompok yang memicu rasa kepemilikan atas hak mereka. Istilah mekanisme pengaduan digunakan untuk mengindikasikan setiap proses rutin baik berbasis Negara maupun non-Negara, yudisial maupun nonyudisial, yang dapat digunakan untuk mengangkat pengaduan tentang pelanggaran hak asasi manusia terkait bisnis dan mencari pemulihannya.

Mekanisme pengaduan berbasis Negara dapat diadministrasi oleh cabang atau lembaga Negara, atau oleh badan independen baik berbasis undang-undang maupun konstitusi. Sifatnya dapat yudisial maupun nonyudisial. Dalam beberapa mekanisme, mereka yang terdampak terlibat langsung dalam upaya memperoleh pemulihan; dalam mekanisme lain, seorang perantara yang berupaya atas nama mereka. Contohnya pengadilan (baik untuk upaya pidana maupun perdata), peradilan tenaga kerja, lembaga hak asasi manusia nasional, Narahubung Nasional di bawah Panduan bagi Perusahaan Multinasional dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, kantor ombudsman, dan kantor pengaduan yang diselenggarakan Pemerintah.

Memastikan akses terhadap pemulihan bagi pelanggaran hak asasi manusia terkait bisnis juga menuntut agar Negara memfasilitasi kesadaran dan pemahaman publik tentang mekanisme ini, bagaimana mekanisme ini dapat diakses dan dukungan (finansial dan keahlian) untuk mengaksesnya.

Mekanisme berbasis Negara baik yang yudisial maupun nonyudisial harus membentuk fondasi dari sistem pemulihan yang lebih luas. Dalam sistem semacam itu, mekanisme pengaduan di tingkat operasional dapat menyediakan peralihan jalan dan resolusi di tahap awal. Mekanisme

berbasis Negara dan tingkat operasional, dapat dilengkapi atau ditingkatkan oleh fungsi pemulihan dari prakarsa kolaboratif serta dari mekanisme hak asasi manusia internasional dan regional. Panduan lebih jauh terkait mekanisme ini disediakan di Prinsip-Prinsip Panduan 26 sampai 31.

## **B. PRINSIP-PRINSIP OPERASIONAL**

### **MEKANISME YUDISIAL BERBASIS NEGARA**

**26. Negara harus mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan efektivitas mekanisme yudisial ketika mengatasi pelanggaran hak asasi manusia terkait bisnis, termasuk mempertimbangkan cara mengurangi hambatan legal, praktis dan hambatan relevan lain yang dapat mengarah pada penolakan akses terhadap pemulihan.**

#### *Penjelasan*

Mekanisme yudisial yang efektif merupakan inti dari upaya memastikan akses terhadap pemulihan. Kemampuannya untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia terkait bisnis tergantung pada ketidakberpihakan, integritas, dan kemampuan mereka untuk menawarkan proses hukum yang adil.

Negara harus memastikan bahwa mereka tidak membuat hambatan yang menghalangi kasus yang sah untuk dibawa ke pengadilan dalam situasi di mana jalur yudisial merupakan bagian penting dalam mengakses pemulihan atau di mana sumber alternatif pemulihan yang efektif tidak tersedia. Mereka juga harus memastikan bahwa penyediaan keadilan tidak dicegah oleh korupsi dalam proses yudisial, bahwa pengadilan berdiri mandiri dari tekanan ekonomi atau politik dari badan Negara lain dan dari aktor bisnis, dan bahwa kegiatan pembela hak asasi manusia yang sah dan damai tidak dihalangi.

Hambatan hukum yang dapat mencegah di atasinya kasus sah yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia terkait bisnis dapat timbul apabila, misalnya:

- Cara tanggung jawab hukum dikaitkan kepada anggota kelompok perusahaan di bawah hukum pidana dan perdata domestik memfasilitasi pengelakan dari akuntabilitas yang patut;
- Penggugat menghadapi penolakan keadilan di Negara tuan rumah dan tidak dapat mengakses pengadilan Negara asal terlepas dari kelayakan klaim;
- Kelompok tertentu, seperti masyarakat adat dan migran, dikecualikan dari tingkat perlindungan hukum yang sama terhadap hak asasi manusia

mereka dengan yang berlaku bagi masyarakat yang umum.

Hambatan praktis dan prosedural terhadap akses pemulihan yudisial dapat timbul ketika misalnya:

- Biaya mengajukan klaim melebihi upaya pencegahan pengajuan kasus yang tidak layak dan/atau tidak dapat dikurangi ke tingkat yang lebih wajar melalui dukungan Pemerintah, mekanisme "berbasis pasar" (seperti asuransi litigasi dan struktur biaya hukum), atau cara lain;
- Penggugat mengalami kesulitan memperoleh perwakilan hukum, karena kurangnya sumber daya atau insentif lain bagi pengacara untuk menasihati penggugat di bidang ini;
- Tidak ada pilihan yang memadai untuk menggabungkan klaim atau memungkinkan proses melalui perwakilan (seperti gugatan kelompok dan prosedur gugatan kolektif lainnya), dan hal ini mencegah pemulihan efektif bagi penggugat individu;
- Jaksa penuntut kekurangan sumber daya, keahlian, dan dukungan yang memadai untuk memenuhi kewajiban Negara untuk menyelidiki individu dan bisnis yang terlibat dalam tindak pidana terkait hak asasi manusia.

Di antara hambatan ini, banyak yang merupakan akibat dari, atau diperparah oleh ketidakseimbangan antara para pihak dalam gugatan hak asasi manusia terkait bisnis, seperti dalam hal sumber daya keuangan, akses terhadap informasi dan keahlian. Lebih dari itu, individu dari kelompok atau masyarakat yang berada pada risiko kerentanan atau marginalisasi yang meningkat sering kali menghadapi halangan budaya, sosial, fisik, dan keuangan tambahan dalam mengakses, menggunakan, dan memperoleh manfaat dari mekanisme ini, baik akibat diskriminasi aktif maupun sebagai konsekuensi yang tidak diinginkan akibat rancangan atau cara beroperasinya mekanisme yudisial. Perhatian khusus perlu diberikan terhadap hak-hak dan kebutuhan khusus kelompok atau masyarakat semacam ini, di setiap tahapan proses pemulihan: akses, prosedur, dan hasil.

## **MEKANISME PENGADUAN NONYUDISIAL BERBASIS NEGARA**

**27. Negara harus menyediakan mekanisme nonyudisial yang efektif dan layak, bersamaan dengan mekanisme yudisial, sebagai bagian dari sistem berbasis Negara yang komprehensif untuk pemulihan pelanggaran hak asasi manusia terkait bisnis.**

*Penjelasan*

Mekanisme administratif, legislatif, dan nonyudisial lainnya memainkan peran yang penting dalam melengkapi dan menambahkan mekanisme yudisial. Bahkan ketika sistem yudisial efektif dan cukup memiliki sumber daya, mereka tidak dapat menanggung beban mengatasi semua tuduhan pelanggaran; pemulihan yudisial tidak selalu dibutuhkan; dan tidak selalu merupakan pendekatan yang disukai oleh semua penggugat.

Kesenjangan dalam penyediaan pemulihan bagi pelanggaran hak asasi manusia terkait bisnis dapat diisi, jika patut, dengan memperluas mandat mekanisme nonyudisial yang ada dan/atau dengan menambahkan mekanisme lain. Mekanisme ini dapat berbasis mediasi, adjudikatif, atau mengikuti proses yang pantas secara budaya dan kompatibel dengan hak - atau melibatkan kombinasi keduanya - tergantung pada masalah terkait, kepentingan publik yang terlibat, dan potensi kebutuhan para pihak. Untuk memastikan efektivitasnya, mereka harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam Prinsip 31.

Lembaga hak asasi manusia nasional memegang peran yang sangat penting dalam hal ini.

Sebagaimana dengan mekanisme yudisial, Negara harus mempertimbangkan cara mengatasi segala bentuk ketidakseimbangan para pihak dalam klaim hak asasi manusia terkait bisnis, dan hambatan akses lainnya yang dihadapi oleh individu dari kelompok atau masyarakat yang berada pada risiko kerentanan dan marginalisasi yang meningkat.

## **MEKANISME PENGADUAN BERBASIS NONNEGARA**

### **28. Negara harus mempertimbangkan cara memfasilitasi akses terhadap mekanisme pengaduan berbasis non-Negara, yang menangani kerugian hak asasi manusia.**

#### *Penjelasan*

Satu kategori mekanisme pengaduan berbasis non-Negara mencakup mekanisme yang diadministrasi oleh badan usaha secara mandiri atau bersama-sama pemangku kepentingan, oleh asosiasi industri, atau kelompok multipemangku kepentingan. Mekanisme ini nonyudisial, namun mungkin mengandung proses adjudikatif, berbasis dialog, atau proses lain yang pantas secara budaya dan kompatibel dengan hak. Mekanisme ini dapat menawarkan manfaat tertentu seperti kecepatan akses dan pemulihan, biaya yang lebih rendah, dan/atau jangkauan transnasional.

Kategori lain terdiri dari badan hak asasi manusia regional dan internasional. Kategori ini telah paling banyak menangani pelanggaran Negara terhadap

kewajiban mereka menghormati hak asasi manusia. Namun demikian, beberapa juga telah menangani kegagalan Negara untuk memenuhi tugasnya untuk melindungi terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh badan usaha.

Negara hanya dapat memainkan peran yang membantu dalam meningkatkan kesadaran, atau memfasilitasi akses terhadap opsi semacam itu, bersamaan dengan mekanisme yang disediakan oleh Negara sendiri.

**29. Untuk memungkinkan pengaduan diatasi secara dini dan diremediasi secara langsung, badan usaha harus membentuk atau berpartisipasi dalam mekanisme pengaduan tingkat operasional yang efektif bagi individu dan masyarakat yang mungkin terdampak secara negatif.**

### *Penjelasan*

Mekanisme pengaduan tingkat operasional dapat diakses secara langsung oleh individu dan masyarakat yang mungkin terdampak negatif oleh badan usaha. Mekanisme ini biasanya dikelola oleh perusahaan, secara mandiri atau berkolaborasi dengan orang lain, termasuk dengan pemangku kepentingan relevan. Mekanisme ini juga mungkin disediakan melalui bantuan ahli atau badan eksternal yang dapat diterima bersama. Mekanisme ini tidak mensyaratkan agar mereka yang mengajukan keluhan harus terlebih dahulu mengakses sarana bantuan lain. Mereka dapat melibatkan badan usaha secara langsung dalam menilai permasalahan dan mencari pemulihan dari kerugian apa pun.

Mekanisme pengaduan tingkat operasional melakukan dua fungsi utama sehubungan dengan tanggung jawab badan usaha untuk menghormati hak asasi manusia.

- Pertama, mendukung identifikasi dampak merugikan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari uji tuntas hak asasi manusia sebuah perusahaan. Hal ini dilakukan dengan menyediakan saluran bagi mereka yang secara langsung terdampak oleh operasi perusahaan untuk mengangkat kekhawatiran mereka apabila mereka merasa telah atau akan terdampak kerugian. Dengan menganalisis tren dan pola keluhan, badan usaha dapat juga mengidentifikasi masalah sistemis dan mengadaptasi praktik mereka;
- Kedua, mekanisme ini memungkinkan diatasinya pengaduan segera sesudah diidentifikasi, dan meremediasi dampak merugikannya secara dini dan langsung oleh badan usaha, dengan demikian, mencegah semakin bertumpuknya kerugian dan semakin meningkatnya keluhan.

Mekanisme ini tidak mensyaratkan agar suatu keluhan atau pengaduan sudah mencapai tingkat tuduhan pelanggaran hak asasi manusia sebelum dapat diangkat, namun secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi segala keprihatinan yang berdasar dari mereka yang mungkin terkena dampak merugikan. Jika kekhawatiran tersebut tidak diidentifikasi atau ditangani, mungkin seiring waktu dapat meningkat menjadi sengketa yang lebih besar dan pelanggaran hak asasi manusia.

Mekanisme tingkat operasional harus mencerminkan kriteria tertentu untuk memastikan efektivitasnya dalam praktik (Prinsip 31). Kriteria ini dapat dipenuhi melalui berbagai bentuk mekanisme keluhan menurut tuntutan skala, sumber daya, sektor, budaya, dan parameter lainnya.

Mekanisme pengaduan tingkat operasional dapat menjadi pelengkap penting bagi keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih luas dan proses perundingan bersama, namun tidak dapat menggantikan keduanya. Mekanisme ini tidak boleh digunakan untuk mengurangi peran serikat pekerja yang sah dalam menangani sengketa terkait perburuhan, atau untuk menghalangi akses terhadap mekanisme pengaduan yudisial atau nonyudisial lainnya.

**30. Prakarsa industri, multipemangku-kepentingan dan prakarsa kolaboratif lainnya yang didasarkan pada penghormatan terhadap standar terkait hak asasi manusia harus memastikan tersedianya mekanisme pengaduan yang efektif.**

*Penjelasan*

Standar terkait hak asasi manusia semakin tercermin dalam komitmen yang diambil oleh badan industri, prakarsa multipemangku kepentingan dan inisiatif kolaboratif lainnya, melalui kode perilaku, standar kinerja, perjanjian kerangka kerja global antara serikat buruh dan perusahaan transnasional, serta upaya serupa.

Prakarsa kolaboratif seperti ini harus memastikan ketersediaan mekanisme yang efektif yang dapat digunakan pihak terdampak atau perwakilan resmi mereka untuk mengangkat kekhawatiran mereka ketika mereka merasa bahwa komitmen yang dimaksud belum terpenuhi. Keabsahan prakarsa semacam ini dapat terancam jika tidak menyediakan mekanisme demikian. Mekanisme ini bisa berada di tingkat anggota individu dari prakarsa kolaboratif, atau keduanya. Mekanisme ini harus memungkinkan akuntabilitas dan membantu memungkinkan remediasi dari dampak merugikan terhadap hak asasi manusia.

## KRITERIA EFEKTIVITAS UNTUK MEKANISME PENGADUAN NONYUDISIAL

31. Untuk memastikan efektivitasnya, mekanisme pengaduan nonyudisial, baik yang berbasis Negara maupun non-Negara, harus:

- (a) Sah: menimbulkan kepercayaan dari kelompok pemangku kepentingan yang merupakan target pengguna, dan perlakuan adil terhadap proses pengaduan dapat dipertanggungjawabkan;
- (b) Dapat diakses: dikenal oleh kelompok pemangku kepentingan yang merupakan target pengguna, dan menyediakan bantuan yang memadai bagi mereka yang mungkin menghadapi hambatan tertentu untuk mengaksesnya;
- (c) Dapat ditebak: menyediakan prosedur yang jelas dan diketahui dengan kerangka waktu indikatif untuk setiap tahap, dan kejelasan tentang jenis proses dan hasil yang tersedia, dan sarana untuk memantau pelaksanaan;
- (d) Adil: berusaha untuk memastikan bahwa para pihak yang dirugikan memiliki akses yang wajar terhadap sumber informasi, nasihat, dan keahlian yang diperlukan untuk terlibat dalam proses pengaduan dengan kondisi yang adil, terinformasi, dan terhormat;
- (e) Transparan: memastikan para pihak yang terlibat terinformasi tentang perkembangan, dan menyediakan informasi tentang kinerja mekanisme untuk membangun kepercayaan terhadap efektivitasnya dan memenuhi kepentingan publik yang dipertaruhkan;
- (f) Kompatibel dengan hak: memastikan bahwa hasil dan pemulihan sesuai dengan hak asasi manusia yang diakui secara internasional;
- (g) Sumber pembelajaran yang berkelanjutan: memanfaatkan langkah-langkah yang relevan untuk mengidentifikasi pembelajaran untuk memperbaiki mekanisme dan mencegah keluhan dan kerugian di masa mendatang;

Mekanisme tingkat operasional juga harus:

- (h) Didasarkan pada keterlibatan dan dialog: berkonsultasi dengan kelompok yang menjadi target pengguna tentang rancangan dan kinerjanya, dan fokus pada dialog sebagai sarana menangani dan menyelesaikan keluhan.

### *Penjelasan*

Mekanisme pengaduan hanya dapat memenuhi tujuannya jika orang-orang yang menjadi target layanannya mengetahui tentang mekanisme tersebut, mempercayainya, dan dapat menggunakannya. Kriteria ini menyediakan tolok ukur untuk merancang, merevisi, atau menilai sebuah mekanisme pengaduan nonjudisial untuk membantu memastikan efektivitasnya dalam praktik. Mekanisme yang dirancang atau diimplementasikan dengan buruk dapat berisiko memperparah keluhan di antara pemangku kepentingan terdampak dengan meningkatkan perasaan tidak berdaya dan tidak dihormati oleh proses tersebut.

Tujuh kriteria pertama berlaku untuk mekanisme berbasis negara maupun non-Negara, berbasis adjudikatif maupun dialog. Kriteria kedelapan khusus untuk mekanisme tingkat operasional yang dibantu dikelola oleh badan usaha.

Istilah "mekanisme pengaduan" digunakan di sini sekadar sebagai istilah. Istilah itu sendiri mungkin tidak selalu tepat atau membantu jika diterapkan pada mekanisme tertentu, namun kriteria efektivitasnya tetap sama. Penjelasan atas kriteria secara spesifik adalah berikut ini:

- (a) Pemangku kepentingan yang menjadi target pengguna mekanisme harus mempercayainya jika mereka harus memilih untuk menggunakannya. Akuntabilitas untuk memastikan bahwa para pihak suatu proses pengaduan tidak ikut campur dengan perlakuannya yang adil biasanya merupakan sebuah faktor penting dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan;
- (b) Hambatan untuk mengakses dapat mencakup kurangnya kesadaran tentang keberadaan mekanisme, bahasa, literasi, biaya, lokasi fisik, dan ketakutan akan pembalasan;
- (c) Agar sebuah mekanisme dapat dipercaya dan digunakan, mekanisme tersebut harus menyediakan informasi publik tentang prosedur yang ditawarkannya. Kerangka waktu untuk setiap tahapan harus dihargai sebisa mungkin, sambil mengizinkan fleksibilitas yang terkadang dibutuhkan;
- (d) Dalam pengaduan atau sengketa antara badan usaha dan pemangku kepentingan yang terdampak, sering kali pemangku kepentingan kekurangan akses terhadap informasi dan sumber daya ahli, dan sering kali kekurangan sumber dana untuk membayarnya. Apabila ketidakseimbangan ini tidak diatasi, hal ini

- dapat mengurangi pencapaian serta persepsi akan adanya proses yang adil, dan semakin sulit untuk mencapai solusi yang tahan lama;
- (e) Berkomunikasi teratur dengan para pihak tentang perkembangan pengaduan individu adalah penting untuk mempertahankan kepercayaan terhadap proses. Penyediaan transparansi tentang kinerja mekanisme bagi pemangku kepentingan yang lebih luas, melalui statistik, studi kasus, atau informasi yang lebih rinci tentang penanganan kasus tertentu, dapat berperan penting dalam mendemonstrasikan keabsahannya dan menjaga kepercayaan secara umum. Di saat yang sama, kerahasiaan dialog antara para pihak dan identitas para individu harus dijaga jika perlu;
  - (f) Pengaduan sering kali tidak dikemas dalam istilah hak asasi manusia, dan banyak yang awalnya tidak mengangkat masalah hak asasi manusia. Terlepas dari itu, jika hasilnya memiliki implikasi terhadap hak asasi manusia, perlu dijaga agar hasilnya selaras dengan hak asasi manusia yang diakui secara internasional;
  - (g) Analisis teratur terhadap frekuensi, pola, dan penyebab keluhan dapat memungkinkan lembaga yang mengelola mekanisme untuk mengidentifikasi dan memengaruhi kebijakan, prosedur, atau praktik yang harus diubah untuk mencegah kerugian di masa mendatang;
  - (h) Untuk mekanisme pengaduan tingkat operasional, melibatkan kelompok pemangku kepentingan dalam rancangan dan kinerjanya dapat membantu memastikan bahwa mekanisme tersebut memenuhi kebutuhan mereka, bahwa mereka akan menggunakannya dalam praktik, dan adanya kepentingan bersama dalam memastikan kesuksesannya. Berhubung sebuah badan usaha tidak dapat secara sah menjadi subjek pengaduan dan di saat yang sama menentukan hasilnya secara unilateral, mekanisme ini harus berfokus untuk mencapai solusi yang disepakati melalui dialog. Jika dibutuhkan adjudikasi, hal ini harus disediakan oleh mekanisme pihak ketiga yang sah dan independen



